

Maritim Butuh Kesyinambungan

JAKARTA, KOMPAS — Membangun sebuah negara maritim bukan langkah mudah sehingga dibutuhkan kerja keras yang berkelanjutan antarperintahan. Upaya tersebut idealnya tidak hanya sebagai spirit, tetapi juga harus ditetapkan secara implisit ke dalam undang-undang.

Hal ini mengemuka dalam peluncuran buku *Menyibak Gelombang Menuju Negara Maritim* karya Ketua Bidang Kajian Strategis Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Laut Laksamana Muda (Purn) Darmawan di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa (4/9/2018). Darmawan mengatakan, untuk membentuk negara maritim yang kuat tidaklah mudah dan tidak bisa dalam waktu singkat. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan upaya secara kesyinambungan antara pemerintahan satu dan lainnya.

"Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa berlanjut. Siapa pun presidennya seharusnya meletakkan dasar-dasar maritim untuk pembangunan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Dalam kelembagaan, membangun negara maritim seharusnya dilakukan secara berkelanjutan," kata Darmawan.

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memang bertekad menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pemerintah pun membuat sejumlah kebijakan dengan membangun daerah-daerah kepulauan untuk mendorong konektivitas orang dan barang di seluruh Indonesia.

Semangat membentuk negara maritim ini agar berjalan secara berkelanjutan idealnya harus dicantumkan dalam undang-undang. Sebab, jika tidak diatur dalam undang-undang, hal itu sulit diwujudkan oleh pemerintahan selanjutnya.

"Saat ini spirit sudah ada, tetapi pembangunan negara maritim secara berkelanjutan harus terdapat secara implisit pada undang-undang. Saat ini masih sebatas visi, tetapi belum dilandasi dengan undang-undang," ujarnya.

Menurut Darmawan, spirit yang sudah ada saat ini harus diwujudkan dalam unsur-unsur legalitas, termasuk undang-undang. Jadi, pembangunan negara maritim harus menjadi semacam pembangunan jangka panjang yang disahkan oleh undang-undang dan menjadi komitmen seluruh bangsa.

"Itu yang paling mendesak. Kalau hanya keppres (keputusan presiden), ganti presiden juga akan ganti lagi kebijakan, jadi tidak akan efektif. Kalau undang-undang tentu akan dijalankan terus," ujar Darmawan.

Ia mengatakan, kinerja pemerintahan saat ini dalam mewujudkan negara maritim sulit untuk diukur keberhasilannya mengingat dilakukan dalam waktu yang cukup singkat. Namun, menurut dia, pelaksanaan yang sudah berjalan masih belum signifikan.

"Selama ini ada sasaran-sasaran yang sudah dicapai oleh pemerintahan sekarang. Tetapi juga banyak hambatan, tidak efisien, dan tidak efektif," katanya.

Jangka panjang

Yang dilakukan saat ini, lanjut Darmawan, masih sebatas peletakan dasar-dasar. Akan tetapi, ia menyadari, hal itu wajar karena mewujudkan negara maritim tidak bisa hanya dalam satu periode masa pemerintahan.

Upaya ini seharusnya berlanjut dan bergulir dalam jangka panjang.

Dalam kesempatan ini, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Siwi Sukma Adji dalam pidato tertulis yang dibacakan Asisten Pembinaan Potensi Maritim KSAL Laksamana Muda Edi Sucipto mengatakan, semua pihak harus menyamakan persepsi dan saling bantu mewujudkan visi maritim Indonesia.

Menurut Siwi, jika tidak ada kebersamaan dan kekompakan dalam memberantas pelanggaran di laut, kepentingan nasional di laut akan terganggu dan melemahkan Indonesia sebagai negara maritim.

"Laut kita sangat luas dan kaya sehingga perlu upaya yang serius dari semua insan bahari Nusantara untuk menjaga, melindungi, mengelola, dan memanfaatkannya secara lestari untuk kesejahteraan rakyat," kata Sukma.

Adapun mantan Duta Besar RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Makarim Wibisono mengatakan, visi negara maritim ini tidak hanya harus dimiliki oleh lembaga negara, tetapi juga oleh seluruh bangsa Indonesia. Harus ada konsensus nasional untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang tangguh.

"Suara kita harus bulat mengenai negara maritim Indonesia," katanya. (E21)